

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 KESIMPULAN

Dari analisis kebijakan otonomi khusus terhadap pembangunan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Manokwari Selatan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan otonomi khusus ini memberikan efek yang positif terhadap pembangunan fisik dan non fisik pada sektor tersebut, walaupun masih terdapat sejumlah keterbatasan, dari aspek ketersediaan, kualitas, aksesibilitas, kesesuaian dan pemanfaatannya. Diantaranya fasilitas pendidikan rata-rata masih memiliki kekurangan baik fasilitas dan tenaga pengajar. Kualitas juga masih menjadi isu, misalnya masih terdapat fasilitas sekolah dalam kondisi rusak berat. Persentase guru tanpa kualifikasi juga masih tinggi, khususnya pada jenjang SD dan SMP. Begitu pula dengan angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi dan rasio tenaga kesehatan yang masih rendah. Dengan jarak antara desa yang relatif jauh, jangkauan layanan dari masing-masing fasilitas berkisar 2-5 kilometer atau lebih. Namun secara keseluruhan, indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Manokwari Selatan secara konsisten mengalami kenaikan sejak 2013, seiring dengan mulainya berjalannya otonomi khusus di tahun 2001 dan pemekaran wilayah di tahun 2012. Berikut adalah mengenai Isu kelembagaan dan aspek tata kelola antar sektoral yang harus segera di perbaiki agar turunan undang-undang dalam peraturan daerah bisa menghasilkan program atau kebijakan khusus yang bisa terealisasi dan tepat sasaran terhadap akar persoalan agar pembangunan bisa efektif secara tuntas dan holistik.

5.2 REKOMENDASI

Berdasarkan uraian di atas maka akan ada dua rekomendasi yaitu praktis dan teoritis. Untuk praktis dalam tulisan ini adalah :

1. Evaluasi mulai dari tingkat provinsi sampai ke daerah dari aspek ketersediaan fasilitas dan tenaga guru serta tenaga kesehatan baik dari segi pendanaan hingga pengelolaan dalam bentuk program yang harus terarah pada sasaran kebijakan ini yaitu orang asli Papua ini masih

perlu banyak perbaikan kedepannya, berikut adalah mengenai payung hukum mengenai undang-undang otonomi khusus No.21 Tahun 2001 ini yang diturunkan agar dapat dilaksanakan peraturan daerah ke kabupaten kota untuk bisa merumuskan peraturan daerah sesuai dengan kondisi yang ada di daerah.

2. Kelembagaan dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan saat ini belum berjalan baik seperti hal pendidikan saat ini dipisahkan pengurusan SD dan SMP diurus oleh Pemerintah kabupaten dan tingkat SMA oleh Provinsi dan ini menjadi persoalan karena banyaknya SMA dan luas wilayah diatur kurang maksimal karena hal teknis jika ditangani oleh masing-masing kabupaten bisa lebih baik laporanya yang bisa lebih efektif yaitu harus ada pelaksana teknis kabupaten dan supervisinya yaitu provinsi model ini harus dirubah dan dievaluasi. Bagi kepala desa juga harus diberi pendampingan teknis dan perlu ada pengawasan lebih ketat agar pengelolaan dana desa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
3. Penyaluran bantuan yang mengatasnamakan otonomi khusus belum sepenuhnya tepat dan benar terhadap akar persoalan pendidikan serta kesehatan dan belum sepenuhnya diketahui serta dirasakan oleh para siswa dan masyarakat sendiri, perlu adanya sosialisasi dan pemahaman akan adanya kebijakan ini sampai ke masyarakat yang paling jauh.
4. Di perlukan strategic planing yang komprehensif dalam bidang peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana agar dapat secara strategis meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas yang masih sangat memprihatinkan dikarenakan jarak yang begitu jauh antara satu desa dan desa lain serta fasilitas sekolah dan kesehatan membuat masyarakat cukup kesulitan mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan efisien
5. Peranan dan fungsi bidan desa perlu ditingkatkan agar pelayanan kesehatan desa bisa lebih optimal, memasyarakatkan penggunaan tanaman obat yang benar dengan memberi pemahaman kepada

penduduk perdesaan. Perlu diperhatikan kesejahteraan para tenaga kontrak daerah yang paling terpencil.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi rekomendasi teoritis dalam tulisan ini adalah :

1. Stigma negatif atas implementasi desentralisasi dan otonomi saat ini harus dijawab dengan semangat pendalaman desentralisasi melalui penyegaran kembali nilai-nilai dasar desentralisasi, yakni kesejahteraan publik. Hal ini jika dilihat dari *output* implementasi kebijakan desentralisasi dapat dikatakan relatif berhasil namun dilihat dari aspek *outcomes* kebijakan ternyata banyaknya urusan yang telah diterima (desentralisasi) oleh kota atau kabupaten justru menjadi beban berat bagi daerah. Akhirnya harapan kebijaksanaan seperti memacu pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia dalam berbagai program pembangunan, pelaksanaannya ada yang belum sepenuhnya efektif.
2. Mengaudit mutu desentralisasi harus dikembangkan dalam dimensi pemerintahan yang bertanggung jawab sebagai ukuran bekerjanya suatu rezim desentralisasi yang mensejahterakan rakyat. Penyelenggaraan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia harus meningkatkan transparansi informasi serta tidak memunculkan peluang dominasi kontrol oleh elit lokal yang dapat menghasilkan informasi yang tidak utuh *asymmetric information* pada gilirannya ini pun akan berdampak pada efisiensi kelembagaan *institution efficiency* karena Indikator *output* dan *outcome* dalam penilaian keberhasilan suatu kebijakan desentralisasi dapat dilihat dengan peningkatan kualitas pelayanan publik juga fleksibilitas program pembangunan. Aspek *outcomes* kebijakan desentralisasi dapat dilihat dari aspek peningkatan partisipasi masyarakat dan efektivitas pelaksanaan koordinasi antar sektoral karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah di kota atau kabupaten yaitu aspek manajerial, aspek sumber daya organisasi, aspek budaya birokrasi dan aspek politik lokal.

3. Sebagai strategi kultural untuk merealisasikan prinsip *diversity in unity* atau *unity in diversity* desentralisasi dalam ruang otonomi khusus dapat memperkuat tujuan desentralisasi yakni untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan negara, sekaligus memperkuat struktur demokrasi sampai kepada tingkat lokal. Pembangunan demokrasi lokal memiliki probabilitas untuk lebih diperkuat dengan cara mengakui dan mengakomodasikan berbagai perbedaan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan latar belakang sejarah dari masing-masing daerah kedalam sistem kebijakan nasional. Mengingat bahwa setiap daerah atau wilayah dalam sebuah negara memiliki anatomi politik, sosial, maupun kultural yang beragam maka desain desentralisasi yang berbeda seperti pembelakuan otonomi khusus menjadi alternatif yang strategis untuk menghindari terjadinya kekecewaan daerah terhadap pemerintah nasional. Perlunya reformasi desentralisasi yang inisiatif berasal dari pusat top-down dengan kepastian dilakukan atas dasar pertimbangan efisiensi. Pada saat yang sama, dorongan dan tuntutan terhadap desentralisasi yang datang dari bawah bottom-up yang akan berorientasi pada upaya memperbesar demokrasi agar mampu menciptakan keseimbangan peran dan tanggungjawab antara pusat dan daerah.
4. Untuk mencapai dimensi terpenting dari variasi atau format desentralisasi yaitu pencapaian terhadap esensi desentralisasi yakni keseimbangan peran dan tanggungjawab antara pusat dan daerah tersebut maka hal ini dapat terwujud dengan pusat semakin mengurangi tingkat intervensinya melalui berbagai macam aturan serta memperluas otonomi kepada pemerintah daerah. Dengan membangun sistem demokrasi melalui pemberian otonomi kepada unit pemerintahan dibawah pemerintah pusat seperti Indonesia yang menganut sistem kesatuan diharapkan agar lebih komprehensif dalam melakukan reformasi menuju desentralisasi. Sebab, tanggung

jawab akhir suatu penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hal pembelanjaan anggaran negara masih berada di tangan pusat.